

## **Faktor Stagnansi *Peacemaking Process* di Konflik Israel dan Palestina**

**Mohammad Rizki Adi Pradana, Muhamad Syauqillah, Mohammad Izdiyan Muttaqin**

Universitas Indonesia

<sup>1)</sup> mohammad.rizki01@ui.ac.id, <sup>2)</sup> [preside.izdiyan@gmail.com](mailto:preside.izdiyan@gmail.com), <sup>3)</sup> jts.sksg@ui.ac.id

Artikel diterima: 18 Desember 2023, Artikel direvisi: 30 Desember 2023, Artikel disubmit: 31 Desember 2023.

### **Abstrak**

Konflik di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu topik pembahasan yang sering dibicarakan di dalam ranah akademis dengan konteks politik internasional, literatur akademik, dan pemberitaan terkait dinamika negara-negaranya. Konflik yang terjadi bervariasi, mulai dari konflik antar etnis, perang saudara, dan konflik perebutan kawasan. Salah satu konflik yang sering menjadi perbincangan dan telah berjalan hampir 50 tahun lebih adalah konflik antara Israel dan Palestina. Selama 50 tahun, berbagai usaha untuk melakukan proses perdamaian telah dicapai oleh kedua belah pihak, namun belum mendapatkan titik terang walaupun sudah dimediasi oleh negara-negara lainnya.

Berbagai macam usaha dalam menciptakan proses *Peacemaking* atau penciptaan perdamaian dilakukan oleh berbagai pihak, namun selalu mengalami deadlock atau tidak adanya solusi yang mampu menciptakan perdamaian di konflik tersebut. Penulis berpendapat bahwa hal ini terjadi disebabkan karena dua faktor, yaitu (1) pemberian hak veto dari Amerika Serikat terhadap beberapa resolusi perdamaian dan (2) normalisasi hubungan beberapa negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan Israel. Penulis akan mencoba menjelaskan kedua faktor tersebut dengan menggunakan kerangka perspektif *power-dependence relations* dari Emerson. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari perspektif *power-dependence relations* dari Emerson.

**Keywords:** Timur Tengah, Konflik Israel-Palestina, Relasi Kuasa, Hak Veto

### **Abstract**

*Conflict in the Middle East region is a topic of discussion that is often discussed in the academic realm in the context of international politics, academic literature, and news related to the dynamics of the countries. The conflicts that occur vary, ranging from inter-ethnic conflicts, civil wars, and conflicts over territory. One conflict that is often discussed and has been going on for almost 50 years is the conflict between Israel and Palestine. For 50 years, various efforts to carry out a peace process have been achieved by both parties, but have not yet reached a clear conclusion even though they have been mediated by other countries.*

*Various efforts have been made to create a peacemaking process or create peace by various parties, but they always experience deadlock or there is no solution capable of creating peace in the conflict. The author believes that this happened due to two factors, namely (1) the granting of veto rights from the United States to several peace resolutions and (2) the normalization of relations between several countries in the Middle East region and Israel. The author will try to explain these two factors using Emerson's power-dependence relations perspective framework.*

**Keywords:** Middle East, Israel-Palestine Conflict, Power-Dependence, Veto Rights

## **PENDAHULUAN**

Konflik di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu topik pembahasan yang sering dibicarakan di dalam ranah akademis dengan konteks politik internasional, literatur akademik, dan pemberitaan terkait dinamika negara-negaranya. Konflik yang terjadi bervariasi, mulai dari konflik antar etnis, perang saudara, dan konflik perebutan kawasan. Salah satu konflik yang sering menjadi perbincangan dan telah berjalan hampir 50 tahun lebih adalah konflik antara Israel dan Palestina.<sup>1</sup> Selama 50 tahun, berbagai usaha untuk melakukan proses perdamaian telah dicapai oleh kedua belah pihak, namun belum mendapatkan titik terang walaupun sudah dimediasi oleh negara-negara lainnya.

Berbagai macam usaha dalam menciptakan proses *Peacemaking* atau penciptaan perdamaian dilakukan oleh berbagai pihak, namun selalu mengalami *deadlock* atau tidak adanya solusi yang mampu menciptakan perdamaian di konflik tersebut. Penulis berpendapat bahwa hal ini terjadi disebabkan karena dua faktor, yaitu **(1) pemberian hak veto dari Amerika Serikat terhadap beberapa resolusi perdamaian** dan **(2) normalisasi hubungan beberapa negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan Israel**. Penulis akan mencoba menjelaskan kedua faktor tersebut dengan menggunakan kerangka perspektif *power-dependence relations* dari Emerson. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari perspektif *power-dependence relations* dari Emerson.

## **POWER-DEPENDENCE FRAMEWORK**

Emerson menjelaskan bahwa *power* merupakan pengaruh yang dimiliki oleh satu aktor dan menentukan *bargaining position* dari aktor tersebut.<sup>2</sup> Ketika aktor-aktor tersebut berinteraksi dalam satu komunitas, maka akan terbentuk *power-structure*. Terlebih lagi, dalam *power-structure* yang terbentuk di dalam komunitas tersebut pastinya akan menimbulkan *power relations* antar aktor. Menurut Emerson, *power relations* yang terjadi dapat mempengaruhi keputusan dari komunitas tersebut. Dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina setidaknya terdapat dua *power-relations* yang dapat dilihat yaitu *power relations* antara negara di PBB untuk

---

<sup>1</sup> Mirjam E. Sorli, Nils Petter Gleditsch, Havard Strand, "Why Is There So Much Conflict in the Middle East?", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49 No. 1, February 2005, 141

<sup>2</sup> Richard M. Emerson, "Power-Dependence Relations", *American Sociological Review*, Feb., 1962, Vol. 27, No. 1 (Feb., 1962), 31

menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dan *power relations* antara negara-negara kawasan Timur Tengah dalam kasus normalisasi hubungan dengan Israel.

Dalam kasus konflik Israel dan Palestina, negara-negara Arab bersatu dan melawan pendirian negara Israel sehingga menyebabkan Perang Arab-Israel pada tahun tersebut. Beberapa negara Arab yang melakukan perlawanan diantaranya adalah Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Jordan, Saudi Arabia, Yaman, dan Palestina.<sup>3</sup> Namun, apabila peperangan tersebut bukan menjadi tolok ukur bermulanya konflik melainkan Manifesto Bilu yang menjadi pemicu/awal dari gerakan Zionisme pada tahun 1882, maka konflik tersebut sudah berumur lebih dari satu abad.

Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, tanggal tersebut merupakan sehari sebelum Inggris menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada PBB pada 15 Mei 1948. Dengan diumumkannya kemerdekaan Israel, secara langsung, orang-orang Yahudi telah berhasil untuk mencapai tujuan utamanya dalam membangun negara sendiri di tanah Palestina. Hal ini sesuai dengan rumusan dari Theodor Herzl pada bukunya yang berjudul *Der Judenstaat* yang ditulis pada tahun 1896.<sup>4</sup> Namun, keberhasilan ini bukanlah keberhasilan untuk negara lain, terutama Palestina, karena masyarakat Yahudi dan masyarakat Palestina masih berkonflik karena perbedaan ideologi serta sudut pandang dalam melihat kependudukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

## ***HASIL DAN PEMBAHASAN***

Terlepas dari perbedaan ideologi dan sudut pandang, berbagai upaya telah ditempuh untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Salah satu aktor internasional yang berperan aktif untuk penyelesaian konflik ini adalah PBB atau lebih detailnya lagi adalah Dewan Keamanan PBB (DK PBB). DK PBB adalah salah satu badan dari PBB yang memiliki peran penting dan sangat besar terhadap penjagaan terhadap perdamaian internasional dan keamanannya. Salah satu kemampuan terbesar dari DK PBB adalah kepemilikan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap dari DK PBB, yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan Perancis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Aos Yuli Firdaus and Yanyan Mochamad Yani, "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel", *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020, 105.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Majid Bozorgmehri and Alireza Mohammad Khani, "Palestinian Issue and the Security Council of UN: Use of Veto Prevent the Establishment of International Peace", *Geopolitics Quarterly*, Volume: 7, No 4, Winter 2011, 79

## **Pemberian Hak Veto dari Amerika Serikat terhadap Beberapa Resolusi Perdamaian**

Hak veto ini diatur dalam Artikel 27 pada Piagam PBB yang menyatakan bahwa keputusan DK PBB pada semua hal yang bersifat substantif membutuhkan persetujuan dari anggota tetap DK PBB. Apabila ada satu anggota saja yang tidak sepakat, walaupun mayoritas sepakat, dalam hal tersebut, maka inisiatif tersebut tidak akan dijalankan dan proposal tersebut harus dikaji ulang. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan hak veto.<sup>6</sup> Hak inilah yang awal terbentuk memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Namun, pertanyaannya, perdamaian dan keamanan dunia menurut siapa?

Polemik kepemilikan hak veto juga menjadi salah satu penyebab utama konflik antara Israel dan Palestina. Hal ini dibuktikan pada tahun 1946 sampai 2007, total sudah ada 384 hak veto diberikan. Bahkan, AS menggunakan hak veto pada 82 kesempatan atau 20% dari total hak veto yang diberikan. Lebih jauh lagi, hak veto yang dikeluarkan AS lebih sering untuk mendukung Israel di dalam beberapa kesempatan.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa resolusi konflik yang diinisiasi oleh DK PBB untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina akan menemui hambatan yang sangat besar dan tentunya akan memperlambat proses resolusi konflik tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis mendapatkan pandangan bahwa peran dari DK PBB sebenarnya memiliki peran yang besar terhadap resolusi konflik Israel dan Palestina. Namun, keberadaan AS dalam anggota tetap DK PBB dengan hak vetonya menjadi penghambat bagi resolusi konflik antara Israel dan Palestina. Hingga akhirnya, sebuah pertanyaan berulang muncul “Apakah konflik antara Israel dan Palestina akan selesai apabila hak veto ditiadakan dari DK PBB?” Katakanlah, apabila hak veto ditiadakan, pertanyaan selanjutnya, “Apakah dengan hilangnya hak veto akan menyebabkan DK PBB kehilangan kekuatan dan relevansinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional?”

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 80.

<sup>7</sup> *Ibid.*

## **Normalisasi Hubungan Beberapa Negara-Negara di Kawasan Timur Tengah dengan Israel**

Secara geopolitik, Palestina mendapat dukungan dari negara-negara Arab di kawasan tersebut sedangkan Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat sebagai negara *superpower* di dunia.<sup>8</sup> Pada konflik tersebut, posisi dari kedua pihak sangatlah jelas, yaitu negara-negara Arab tidak akan pernah mengakui kedaulatan Israel sampai menyerahkan wilayah yang dianeksasinya, menurut negara-negara arab, kepada Palestina dan Amerika Serikat meminta untuk diadakannya solusi dua negara, adanya negara Palestina dan Israel yang berdiri di kawasan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut bertahan dari awal konflik hingga akhirnya pada tahun 2020, terdapat dua negara arab yang memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yaitu Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, sebagai informasi negara-negara arab sebelum tahun 2020 memiliki prinsip tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sebelum Israel mengembalikan wilayah yang diambilnya dari Palestina.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa terdapat peningkatan potensi ketidakstabilan kawasan apabila normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara arab terus dilakukan tanpa melibatkan Palestina di dalamnya. Penulis berpendapat bahwa sikap UEA dan Bahrain menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi dari negara-negara arab dalam mempertahankan prinsipnya dalam isu konflik Israel dan Palestina. Untuk menjelaskan pendapat penulis, tulisan akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penjelasan mengenai **(1) normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara arab, (2) pandangan masyarakat Palestina terhadap normalisasi, dan (3) analisis kemungkinan ketidakstabilan kawasan apabila normalisasi dilanjutkan.**

Untuk pembahasan pertama, penulis akan menjelaskan tentang normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara arab. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, upaya normalisasi telah diusahakan oleh Israel dan Amerika Serikat hingga akhirnya berhasil dilakukan di dua negara arab, yaitu Bahrain dan UEA, pada tahun 2020. Sebelum membahas lebih jauh mengenai isu normalisasi, penulis akan menjelaskan sedikit tentang konflik Israel dan Palestina untuk memberikan konteks terhadap isu normalisasi yang akan dibahas.

---

<sup>8</sup> Mahmoud Mi'ari, "Attitudes of Palestinians Toward Normalization with Israel", *Journal of Peace Research*, Vol.36 No.3, May 1999, 341

Konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu konflik yang paling bertahan lama dan sulit untuk diselesaikan sejak Perang Dunia II.<sup>9</sup> Akar permasalahan dari konflik ini adalah kolonisasi yang dilakukan oleh Zionis, perkumpulan yahudi yang diciptakan oleh Theodore Herzl, di Palestina. Kolonisasi ini bermula pada abad ke-19 dan semakin memanas selama Perang Dunia II saat Inggris sedang memegang kendali. Mi'ari berpendapat bahwa konflik ini bersumber dari sengketa wilayah antara masyarakat pribumi arab dari Palestina dan masyarakat yahudi yang tinggal di daerah tersebut.<sup>10</sup> Masyarakat yahudi di Palestina mendukung akan gerakan Zionis ini dan menyebabkan konflik dengan masyarakat pribumi arab di kawasan yang sama.

Pada awal proses kolonisasi yang dilakukan dan saat berakhirnya mandat Inggris di kawasan tersebut pada tahun 1948, masyarakat yahudi di Palestina memiliki proporsi 35% dari total populasi yang ada di Palestina dan menguasai 7% dari luas total wilayah Palestina.<sup>11</sup> Masyarakat pribumi arab di Palestina tidak menginginkan adanya negara yahudi di wilayah tersebut, mereka berpendapat bahwa cukup hanya ada satu negara di kawasan tersebut yang mampu menaungi ketiga Agama Ibrahim, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristiani untuk tinggal bersama dengan damai.<sup>12</sup> Namun, karena kekalahan perang yang dialami oleh masyarakat pribumi arab di Palestina pada tahun 1948, prinsip tersebut tidak dapat dipertahankan dan wilayah Palestina terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Peperangan terus berlangsung dan menyebabkan masyarakat pribumi arab di Palestina mengalami beberapa kekalahan yang menyebabkan semakin kecilnya wilayah kekuasaan mereka.

Namun, pada tahun 1973, terjadi upaya untuk melakukan perdamaian dan penurunan intensi konflik antara Palestina dan Israel. Beberapa perjanjian ditandatangani kedua pihak, diantaranya adalah *the Declaration of Principles* yang ditandatangani pada tahun 1993 oleh Palestina dan Israel, *Peace Agreement* yang ditandatangani pada tahun 1994 oleh Israel dan Yordania<sup>13</sup>, serta perjanjian terkini yang kemudian menjadi landasan bagi normalisasi hubunga

---

<sup>9</sup> Mahmoud Mi'ari, "Attitudes of Palestinians Toward Normalization with Israel", 341

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mahmoud Mi'ari, "Attitudes of Palestinians Toward Normalization with Israel", 341

Israel dengan negara-negara Arab adalah *Abraham Accords* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat saat pemerintahan Donald Trump<sup>14</sup>.

Setelah penulis menjelaskan tentang konflik antara Israel dan Palestina, selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang normalisasi yang dimaksud dalam konteks normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara arab. Normalisasi didefinisikan sebagai sebuah konsep dari jarak sosial dalam bermasyarakat, stereotipe, dan penilaian antara masyarakat etnis, dalam hal ini adalah masyarakat yang dijajah dan menjajah.<sup>15</sup> Mi'ari berpendapat bahwa merupakan sebuah hal yang wajar apabila ada jarak sosial antara masyarakat yang dijajah dengan yang menjajah. Namun, dalam kasus normalisasi hubungan antara Arab dengan Palestina memiliki tujuan untuk memperkecil bahkan menghilangkan jarak sosial tersebut.

Walaupun demikian, ternyata terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat Israel dan masyarakat Arab dalam memandang normalisasi.<sup>16</sup> Masyarakat Israel memiliki pandangan bahwa normalisasi dimaksudkan untuk menjalin hubungan antara Israel dengan negara-negara arab, dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Masyarakat Israel tidak mempermasalahkan apakah permasalahan antara Israel dan Palestina akan terselesaikan atau tidak. Hal yang menjadi penting di sini adalah Israel dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara arab.

Di sisi lain, masyarakat Arab memiliki pandangan yang berbeda terkait normalisasi. Mereka berpendapat bahwa normalisasi hubungan harus dimulai dengan Israel mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan politiknya dan memenuhi kriteria politik di kawasan. Dalam hal ini, masyarakat arab melihat bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menjadi kunci penting apabila Israel ingin melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara arab.

Namun, seiring berjalannya waktu dan tentunya dengan usaha-usaha yang dilakukan dari berbagai negara, kedua perspektif tersebut tidak bertahan lama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara-negara arab, yaitu UEA dan Bahrain. Dalam proses normalisasi ini, UEA dan Bahrain mengacu kepada *Abraham Accords* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan terlihat mengendorkan standar yang sudah ditetapkan oleh

---

<sup>14</sup> United States of America, "The Abraham Accords", <https://www.state.gov/the-abraham-accords/> diakses pada 30 Desember 2021

<sup>15</sup> Mahmoud Mi'ari, "Attitudes of Palestinians Toward Normalization with Israel", 339

<sup>16</sup> *Ibid.*, 342

negara-negara arab dalam pemulihan hubungan dengan Israel yaitu memastikan Palestina mendapatkan wilayahnya kembali.

Hal ini apabila diteruskan tentunya akan menyebabkan beberapa potensi konflik di kawasan tersebut apabila proses normalisasi terus dilakukan tanpa negara-negara arab memperhatikan posisi serta sudut pandang Palestina di dalamnya. Oleh karena itu, selanjutnya penulis akan menjelaskan tanggapan Palestina terhadap proses normalisasi yang sedang dilakukan.

Pada pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Minggu, 16 Mei 2021, menteri luar negeri Palestina yaitu Riyad al-Maliki memberikan tanggapan tentang proses normalisasi yang sedang dilakukan oleh beberapa negara arab terhadap Israel.<sup>17</sup> Maliki menyatakan bahwa upaya tersebut adalah sebuah upaya untuk memaklumkan atau mengizinkan kolonialisasi yang dilakukan oleh Israel. Bahkan, Maliki mengemukakan keras terhadap proses tersebut dan menilai bahwa proses normalisasi ini tidak akan mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di kawasan tersebut.

Lebih jauh lagi, Arab Saudi menyatakan dalam forum yang sama bahwa mereka tidak menutup proses untuk melakukan normalisasi dengan Israel dengan syarat Israel mau menyelesaikan konflik dengan Palestina terlebih dahulu. Apabila konflik tersebut belum diselesaikan, maka tidak akan ada normalisasi bagi Israel dari Arab Saudi.

Melihat dinamika tersebut, penulis melihat bahwa pihak pemerintahan Palestina tidak dilibatkan dalam proses normalisasi yang dilakukan oleh UEA dan Bahrain. Sikap pengecaman dan kritikan yang diberikan menunjukkan bahwa pemerintah Palestina merasa belum siap bagi negara-negara arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Penulis menilai sikap pemerintah seharusnya selaras dengan masyarakat Palestina. Namun, ternyata terdapat perbedaan sikap apabila penulis melihat hasil riset yang dilakukan oleh Mi'ari yang mencoba mencari tahu pandangan Masyarakat Palestina terhadap normalisasi hubungan tersebut.

Mi'ari mendapatkan hasil bahwa kebanyakan masyarakat Palestina tidak mempermasalahkan apabila terjadi normalisasi hubungan antara negara-negara arab dengan Israel.<sup>18</sup> Namun, walaupun demikian, ada beberapa pandangan penting yang harus diperhatikan

---

<sup>17</sup> Nurul Khadijah, "Palestina Kecam Normalisasi Hubungan yang Dilakukan Sejumlah Negara dengan Israel", <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011920428/palestina-kecam-normalisasi-hubungan-yang-dilakukan-sejumlah-negara-dengan-israel> diakses pada 30 Desember 2021

<sup>18</sup> Mahmoud Mi'ari, "Attitudes of Palestinians Toward Normalization with Israel", 347



terhadap hasil riset yang dilakukan oleh Mi'ari yaitu waktu pengambilan data dan demografi responden. Penulis melihat bahwa waktu pengambilan data yang dilakukan oleh Mi'ari adalah satu tahun setelah penandatanganan perjanjian antara Israel dan Palestina pada tahun 1994. Lebih jauh lagi, masyarakat Palestina yang menyetujui bahwa normalisasi bukan menjadi hal yang dipermasalahkan adalah masyarakat Palestina yang bekerja di kawasan Israel. Sementara itu, untuk masyarakat yang bekerja di kawasan Palestina dan bekerja sebagai pedagang tidak menyepakati hal itu. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan oleh internal Palestina agar sikap dari negara tersebut jelas dan mampu untuk dipandang konsisten oleh negara-negara yang ingin mendukungnya.

Dari fenomena tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat potensi adanya ketidakstabilan di kawasan apabila normalisasi hubungan terus dilanjutkan tanpa mempertimbangkan posisi dan sudut pandang dari Palestina. Setidaknya terdapat dua alasan yang menyebabkan pendapat tersebut muncul, yaitu perbedaan pandangan dan standar normalisasi dari negara-negara arab dan konflik internal di negara Palestina.

Dalam normalisasi hubungan yang dilakukan oleh UAE dan Bahrain memang disebutkan bahwa akan ada usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Israel dan Palestina. Hal ini terlihat dari kutipan *Abraham Accords* yang ditandatangani oleh kedua negara, yaitu

*“...realistic and enduring solution to the Israeli-Palestinian conflict;”*<sup>19</sup>

Pernyataan tersebut apabila dilihat secara umum terlihat sebagai upaya dari UAE dan Bahrain untuk tetap memperjuangkan Palestina sebagai sebuah negara serta upaya untuk menjaga konsistensi kedua negara di dalam standar yang diterapkan negara-negara arab untuk melakukan normalisasi hubungan.

Namun, apabila dilihat lebih rinci lagi, penulis melihat terdapat potensi formalitas dan multitafsir terhadap pernyataan tersebut. Potensi formalitas terjadi karena sejak awal posisi negara-negara arab adalah mau membuka potensi normalisasi apabila Israel **terlebih dahulu** menyelesaikan konfliknya dengan Palestina sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam fenomena tersebut, UEA dan Bahrain mau melakukan normalisasi di saat Israel belum menyelesaikan konflik tersebut. Di sisi lain, terdapat negara yang masih mau

---

<sup>19</sup> United States of America, “The Abraham Accords”

mempertahankan prinsip awal untuk menerima normalisasi setelah konflik selesai, salah satunya adalah Arab Saudi. Perbedaan standar dan posisi tentunya akan menyebabkan kubu di dalam kawasan. Perpecahan dan pengkubuan yang terjadi memiliki dampak yang cukup signifikan dalam terciptanya ketidakstabilan kawasan.

Potensi multitafsir juga terlihat di dalam *Abraham Accords* yang ditandatangani oleh UEA dan Bahrain. Penggunaan kata *realistic* dan *enduring* apabila dilihat secara umum akan terlihat bahwa ini adalah kesepakatan yang benar-benar dijalani sampai solusi ditemukan. Namun, dalam proses perdamaian atau penyelesaian konflik terdapat perbedaan pandangan terhadap wilayah negara yang dipakai sebagai patokan apabila nantinya solusi dua negara dilakukan. Tidak adanya definisi yang jelas terkait makna realistis, tentunya tidak akan menyelesaikan konflik perebutan wilayah antara Israel dan Palestina.

Alasan kedua, yaitu perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat Israel tentunya menjadi titik fokus tersendiri apabila proses normalisasi ingin berjalan dan benar-benar mampu untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Saat pemerintahan menolak dengan proses normalisasi sementara masyarakat tidak menolaknya tentunya pemerintah mampu kehilangan legitimasi dan daya tawar di kancah internasional. Negara-negara yang semula mendukung dan mengharga prinsip dari Palestina akan mulai mempertanyakan dan meragukan prinsip Palestina di dalam isu normalisasi ini.

## ***KESIMPULAN***

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa hak veto menjadi penyebab dari stagnansi proses peacemaking dari konflik Israel dan Palestina. Lebih jauh lagi, apabila isu normalisasi terus diteruskan dengan kondisi dan pola yang sama seperti ini, maka akan ada kemungkinan normalisasi ini menimbulkan konflik baru di kawasan Timur Tengah. Untuk menghindari hal tersebut, negara-negara arab yang ingin melakukan normalisasi dengan Israel perlu untuk mulai mengubah pendekatannya dengan melibatkan Palestina lebih dalam di proses normalisasi ini. Sementara itu, di sisi yang sama, Palestina juga harus mengkonsolidasikan pandangan negaranya terhadap isu normalisasi ini agar negara-negara arab yang memang ingin mendukung Palestina tidak mempertanyakan dan meragukan akan posisinya. Apabila kedua hal tersebut mampu dilakukan, bukan menjadi hal yang mustahil proses normalisasi ini menjadi langkah untuk memperbaiki kondisi kawasan di Timur Tengah.

## **SARAN**

Pembahasan fokus pada dinamika isu normalisasi akan memberikan gambaran lebih dalam dan luas lagi dalam memahami penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

## ***DAFTAR PUSTAKA***

- Bozorgmehri, Majid and Alireza Mohammad Khani, "Palestinian Issue and the Security Council of UN: Use of Veto Prevent the Establishment of International Peace", *Geopolitics Quarterly*, Volume: 7, No 4, Winter 2011.
- Emerson, Richard M., "Power-Dependence Relations", *American Sociological Review*, Feb., 1962, Vol. 27, No. 1 (Feb., 1962)
- Firdaus, Aos Yuli and Yanyan Mochamad Yani, "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel", *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020.
- Khadijah, Nurul, "Palestina Kecam Normalisasi Hubungan yang Dilakukan Sejumlah Negara dengan Israel", <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011920428/palestina-kecam-normalisasi-hubungan-yang-dilakukan-sejumlah-negara-dengan-israel> diakses pada 30 Desember 2021
- Mi'ari, Mahmoud, "Attitudes of Palestinians Toward Normalization with Israel", *Journal of Peace Research*, Vol.36 No.3, May 1999
- Sorli, Mirjam E., Nils Petter Gleditsch, Havard Strand, "Why Is There So Much Conflict in the Middle East?", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49 No. 1, February 2005
- United States of America, "The Abraham Accords", <https://www.state.gov/the-abraham-accords/> diakses pada 30 Desember 2021